

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika menjadi kewenangan Komunikasi dan Informatika selaku pengampu utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2020, perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Watumalang.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan komunikasi dan informatika mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.

a. Alokasi Pendanaan

Alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2020 berjumlah total Rp3.642.847.000,00 dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp3.450.228.343,00 atau mencapai 94,71%. Belanja urusan komunikasi dan informatika bisa diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III.B.10. 1.
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	3.642.847.000	3.450.228.343	94,71
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	592.313.500	569.382.731	96,13
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	24.499.500	24.379.500	99,51
3	Program kerjasama informasi dengan media massa	138.534.000	138.534.000	100
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	2.887.500.000	2.717.932.112	94,13

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Di era Pandemi Covid-19 kebutuhan akan informasi yang dijadikan acuan bagi masyarakat sangat dibutuhkan di tengah lajunya informasi-informasi yang tidak benar tentang wabah Covid-19, Pemerintah daerah melalui berbagai kanal informasi resmi berupaya mengedukasi masyarakat. Di saat seperti ini maka peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM menjadi penting. Iklan layanan masyarakat dan *Talkshow* menjadi wahana menyiarkan berbagai update informasi tentang Covid-19 mengingat pada lapisan masyarakat tertentu media ini masih relevan untuk diadakan.

Perkembangan Radio Pesona FM sudah tersedia pada versi *streaming* sehingga jangkauannya bukan lagi terbatas wilayah Wonosobo. Jangkauan yang lebih luas dengan media *streaming* akan dapat memberikan informasi kepada khalayak lebih luas tidak hanya orang Wonosobo saja berkaitan dengan informasi yang berkembang di Kabupaten Wonosobo.

Video On Demand (VOD) adalah sistem televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program video dan klip yang ingin ditonton, Wonosobo Electronic Broadcasting TV (WEB TV) menjadi TV *Streaming* resmi yang dikelola Pemerintah Daerah Wonosobo, selain menyiarkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, di era pandemi ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menyajikan Video Pembelajaran untuk membantu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa yang sedang belajar di rumah.

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna menambah sarana tersebarnya informasi sekaligus untuk melibatkan masyarakat untuk menyebarkan informasi. Demikian juga halnya dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra), Pada tahun 2020 kegiatan ini untuk memfasilitasi KIM Kabupaten Wonosobo konsultasi ke Kelompok Informasi Provinsi Jawa Tengah. Forum ini memanfaatkan kebudayaan setempat sebagai media penyebaran informasi, sebagai contoh pentas ketoprak, lengger, wayang, guyon maton dan media tradisional lainnya.

Fasilitasi Hari Pers Nasional tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahmi serta kerja sama dalam pengembangan program *Smart City* sehingga dapat mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada publik menggunakan Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kegiatan difokuskan pada pencegahan penyebaran Covid-19, berupa siaran keliling, bakti sosial, pemasangan baliho dan spanduk serta poster-poster edukasi mengenai Covid-19.

Kegiatan Gelar Informasi daerah pada tahun ini urung dilaksanakan karena sesuai arahan bahwa acara-acara yang berpotensi mendatangkan kerumunan masa untuk dibatalkan, hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

2) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Berkembangnya permasalahan di masyarakat juga memaksa pemerintah mengembangkan sistem pelaporan yang lebih modern, transparan, cepat dan terpercaya, melalui program ini diadakan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan aplikasi Laport, hal ini guna mendukung ekosistem *Smart City* segera terwujud.

3) Program kerjasama informasi dengan media massa

Kegiatan Pengelolaan Kemitraan Komunikasi Publik dengan tujuan desiminasi program pemerintah melalui kemitraan dengan media massa, advertorial program pemerintah daerah di media massa sejumlah 99 paket bulanan dan 6 paket khusus.

4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi

Dukungan perangkat teknologi informasi yang handal menjadi satu hal yang pokok baik di sisi infrastruktur maupun supra strukturnya. Pembangunan Jaringan Fiber optik menjadi salah satu cara untuk menjamin lalu lintas data berjalan lancar dan aman. Percepatan pembangunan jaringan Fiber Optik di dalam kota untuk menghubungkan OPD did alam blok kota pada tahun 2020 mencakup OPD penting (*Backbone*).

Selain jaringan, penguatan infrastruktur Data Center dilakukan dengan menambah Server guna memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan aplikasi yang mendukung ekosistem *Smart City* sebagai contoh *dashboard smart city*, aplikasi *e-office* (Tata Naskah Dinas Elektronik), Satu Data, LPSE, PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dan Sistem Informasi Kebencanaan.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.10. 2.

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK	%	88%	60%	87.50%	146%	ST	65%

III.B.10. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
2	Prosentase SKPD yang menerapkan e-government	%	100%	67%	100%	150%	ST	75%
3	Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	%	20%	50%	20%	40%	SR	75%
4	Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	ST	100%
5	Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan Pemkab	%	28%	50%	35.71%	71.42%	S	60
6	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	%	82%	47%	94.57%	201%	ST	50%
7	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	%	87%	90%	93%	103%	ST	100%
8	Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat	%	86%	90%	90%	100%	ST	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Dari tabel capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika diatas masih perlu upaya yang keras untuk penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan TNDE melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2011 tentang pedoman umum TNDE yang merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah.

Di Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Bagian Organisasi membandingkan beberapa sistem untuk selanjutnya diterapkan di tahun 2021.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.10. 3

Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1.	Agar semua SKPD dapat menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi.	Membandingkan dan ujicoba Sistem Aplikasi TNDE yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dengan Aplikasi serupa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.	Dukungan akses internet untuk semua OPD agar bisa ditingkatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang menggunakan akses internet	Perluasan jaringan fiber optik untuk <i>backbone</i> utama dalam kota, sedangkan untuk OPD yang berada di luar wilayah kota seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai ujicoba sistem jaringan baru demikian juga untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.B.10. 4.

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Mengaplikasikan Sistem TNDE ini secara bertahap, perlu dibuatkan SOP untuk pelaksanaannya dan membuat pilot project pada beberapa OPD pilihan, disesuaikan dengan road map <i>Smart City</i> yang sudah disusun
2.	Kerjasama dengan media massa nasional	Memasarkan potensi kabupaten Wonosobo dengan mencari peluang kerjasama dengan media massa nasional